

PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR ROB DI KELURAHAN TANJUNG MAS KOTA SEMARANG

Muhammad Reza Adi Pratama, Ari Subowo

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The issue of tidal flooding (banjir rob) in Tanjung Mas Village, Semarang City, has become a major concern in disaster governance due to its recurring impacts on social activities, economic conditions, and the sustainability of coastal communities. The increasing occurrence of tidal flooding is influenced by land subsidence, sea-level rise, and the limited capacity of existing flood-control infrastructure, highlighting the need for stronger collaboration among stakeholders. However, mitigation efforts have not been optimal because of weak institutional coordination, limited resources, unequal access to technology, inconsistent public service delivery, and low community awareness of disaster mitigation. This study aims to analyze the Collaborative Governance process in mitigating tidal flooding in Tanjung Mas Village and to identify factors that support and hinder its effectiveness. A descriptive qualitative approach was used through in-depth interviews, observations, and documentation involving BPBD Semarang, related government agencies, village authorities, and community representatives. Data analysis was conducted using the Collaborative Governance framework of Ansell and Gash. The findings indicate that collaboration has been initiated through coordination forums, face-to-face dialogue, information exchange, and basic role distribution among institutions. Nevertheless, the effectiveness of collaboration remains limited due to fragmented coordination structures, inadequate facilities, limited technological support, and low levels of disaster literacy among residents. Supporting factors include strong government commitment, regulatory support, and the presence of active community groups. Therefore, strengthening multisector collaboration, improving institutional capacity, and enhancing community-based disaster education are essential for more effective and sustainable tidal flood mitigation in Tanjung Mas Village.

Keywords: Collaborative Governance, Tidal Flood Mitigation, Disaster Management, BPBD, Tanjung Mas, Semarang City.

ABSTRAK

Permasalahan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang merupakan isu strategis dalam kajian tata kelola bencana karena dampaknya yang berkelanjutan terhadap aktivitas sosial, ekonomi, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya frekuensi rob akibat penurunan muka tanah, pasang air laut, serta keterbatasan infrastruktur pengendalian banjir yang menuntut adanya penguatan kolaborasi antar aktor. Upaya mitigasi yang dilakukan belum optimal karena masih ditemui lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, akses teknologi yang tidak merata, kualitas layanan publik yang belum konsisten, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam penanganan banjir rob serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan BPBD Kota Semarang, Dinas terkait, pemerintah kelurahan, serta masyarakat sebagai informan utama. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik berdasarkan kerangka Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif telah berjalan melalui forum koordinasi, dialog tatap muka, pertukaran informasi, serta pembagian peran dasar antar instansi. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena adanya hambatan kelembagaan, seperti struktur koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan armada operasional, minimnya teknologi pendukung, dan masih rendahnya literasi kebencanaan masyarakat. Faktor pendukung kolaborasi meliputi adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, serta kehadiran kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan penanggulangan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kolaborasi multisektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perluasan edukasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan mitigasi rob yang lebih efektif dan adaptif.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Mitigasi Banjir Rob, Tata Kelola Bencana, BPBD, Tanjung Mas, Kota Semarang.

PENDAHULUAN

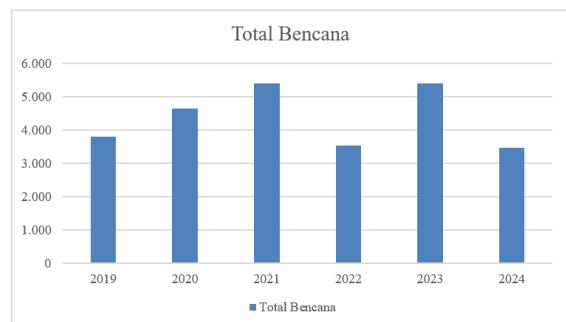
Bencana merupakan peristiwa ekstrem yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia, yang terjadi ketika masyarakat belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapinya. Suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai bencana apabila terdapat interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan kekeringan banyak terjadi di negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah, termasuk Indonesia (BNPB, 2008).

Secara umum, bencana dapat dibedakan menjadi bencana alam dan bencana akibat aktivitas manusia. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan angin kencang, sedangkan bencana akibat aktivitas manusia berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Meskipun bencana sering terjadi secara tiba-tiba, tanda-tanda awalnya masih dapat dikenali sehingga upaya mitigasi menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana agar kerugian dapat diminimalkan (Bakornas, 2007).

Pelaksanaan mitigasi yang efektif memerlukan ketepatan strategi, kesiapan sumber daya, serta pemahaman dalam pemanfaatannya agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan optimal (Aminuddin, 2013; Dodon, 2013).

Gambar 1. 1. Data Terkait Bencana Alam di Indonesia Setiap Tahunnya



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan gambar, jumlah bencana alam di Indonesia selama periode 2019–2024 menunjukkan pola fluktuatif. Data BNPB mencatat sekitar 3.800 kejadian pada tahun 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan sekitar 5.400 kejadian, yang didominasi bencana hidrometeorologi. Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah bencana, namun kembali meningkat pada tahun 2023. Selanjutnya, tahun 2024 menunjukkan penurunan kembali. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa kejadian bencana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika iklim, sehingga diperlukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Penanggulangan bencana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 yang menekankan pergeseran dari penanganan reaktif ke pendekatan preventif melalui mitigasi, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang berfokus pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 yang mengatur penanggulangan bencana pada seluruh tahapan, dengan BPBD Kota Semarang sebagai lembaga utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi penanggulangan bencana.

Peran BPBD sangat krusial di Kota Semarang yang rentan terhadap banjir rob, terutama di Kelurahan Tanjung Mas sebagai kawasan strategis nasional. Banjir rob di wilayah ini tidak hanya berdampak pada permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas pelabuhan, infrastruktur, dan rantai logistik nasional.

Gambar 1. 2. Kejadian banjir di wilayah Kelurahan Tanjung Mas



Sumber : Detik News (2022)

Gambar tersebut menunjukkan banjir dan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas,

Kota Semarang, yang merendam permukiman dan kawasan sekitar pelabuhan. Kondisi ini mencerminkan tingginya kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologis serta dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Banjir dan banjir rob terjadi secara berulang dan memengaruhi aspek sosial, ekonomi, serta mobilitas penduduk.

Banjir rob tidak hanya menyebabkan genangan, tetapi juga menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat pesisir, terutama jika berlangsung lama dan berintensitas tinggi. Dampaknya meliputi terganggunya mobilitas, pendidikan, dan akses layanan kesehatan, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tergenang dan air yang terkontaminasi.

Tabel 1. 1. Data Masyarakat yang Terdampak Banjir Rob di Kelurahan Tanjung Mas

Wilayah	RW Terdampak	Ketinggian Air (cm)	Dampak
Kecamatan Semarang Utara	RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, RW 16	40–70 cm	Banjir rob merendam permukiman
Kelurahan Tanjung Mas	RW 16	60–75 cm	Aktivitas warga terganggu
Kampung Tambakrejo	RW 16	60–75 cm	80 KK terdampak, 15 KK mengungsi ke daerah lebih tinggi
Kelurahan Tanjung Mas	Sejuruwilayah kelurahan tanjung mas yang terdampak	±300 hektar tergenang	2.252 KK terdampak akibat jebolnya tanggul

Sumber : Kompas, Radar Semarang, BPBD Kota Semarang (diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1.Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu wilayah terdampak banjir rob, termasuk Kelurahan Tanjung Mas. Banjir rob merendam lima RW, yaitu RW 12 hingga RW 16, dengan ketinggian genangan air berkisar 40–70 cm. Pada Juni 2022, sekitar 80 kepala keluarga di Kampung Tambakrejo

RW 16 terdampak banjir rob dengan ketinggian air mencapai 60–75 cm, yang mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan 15 kepala keluarga berpindah ke wilayah yang lebih tinggi. Kondisi ini diperparah oleh jebolnya tanggul akibat tingginya debit air laut, sehingga genangan meluas hingga ±300 hektar dan berdampak pada 2.252 kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Mas.

Permasalahan banjir rob yang kompleks memerlukan penanganan terpadu dengan melibatkan berbagai aktor. Dalam konteks ini, *Collaborative Governance* menjadi pendekatan yang relevan, namun efektivitasnya bergantung pada kualitas proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi dalam administrasi publik dipahami sebagai proses bertahap yang mencakup dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan capaian awal sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), di mana setiap tahapan saling memengaruhi satu sama lain.

Penanganan banjir rob di Kota Semarang menuntut kolaborasi lintas aktor karena tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, masyarakat terlibat melalui partisipasi aktif, sementara sektor lain memberikan dukungan pendanaan, teknologi, dan infrastruktur agar mitigasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan dalam penerapan *Collaborative Governance* umumnya terletak pada ketidakseimbangan pelaksanaan tahapan proses kolaborasi. Hidayatullah (2023) menemukan bahwa dalam penanganan banjir di Kota Semarang, dialog dan komitmen antar aktor relatif berjalan baik, namun pemahaman bersama masih lemah akibat perbedaan persepsi terkait penyebab dan solusi banjir. Temuan serupa disampaikan oleh Hazimah Latifah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa meskipun forum kolaborasi telah terbentuk, pembangunan kepercayaan dan konsistensi komitmen antar instansi belum optimal, sehingga hasil kolaborasi cenderung bersifat jangka pendek dan reaktif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak cukup diukur dari adanya kerja sama formal, melainkan dari kualitas proses yang dijalankan.

Dalam konteks Kota Semarang, upaya mitigasi banjir rob juga masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Permatasari dkk. (2012) mengungkapkan bahwa pengelolaan risiko banjir belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan fungsi pompa, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi pemantauan rob. Selain itu, struktur komando dan koordinasi antar instansi dalam penanganan banjir rob masih lemah, ditandai dengan tumpang tindih

kewenangan, lambatnya respons, serta kurang efektifnya penyebaran informasi dan peringatan dini kepada masyarakat (BPBD, 2021).

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana. Data BPBD (2023) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat pesisir yang pernah mengikuti pelatihan mitigasi bencana, sehingga kesiapsiagaan warga masih rendah. Kurangnya literasi kebencanaan ini berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan lingkungan, termasuk sistem drainase yang sering tersumbat dan tidak mampu menampung limpahan air secara efektif (Kompas, 2023).

Kelurahan Tanjung Mas sebagai wilayah yang terdampak banjir rob secara berulang telah melibatkan berbagai aktor dalam upaya mitigasi, mulai dari pemerintah, BPBD, hingga masyarakat. Namun, masih terjadinya banjir rob menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* yang dijalankan belum sepenuhnya efektif. Hingga saat ini, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengidentifikasi tahapan proses *Collaborative Governance* yang paling mengalami hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* berdasarkan kerangka Ansell dan Gash guna mengetahui tahapan yang paling

membutuhkan penguatan dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, dengan pertanyaan penelitian utama: *Mengapa proses Collaborative Governance dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang belum berjalan secara maksimal?*

KAJIAN TEORI

1. Proses *Collaborative Governance*

Kolaborasi menekankan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Efektivitasnya, menurut Ansell dan Gash (2008), ditentukan oleh dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama, hasil sementara yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi secara bertahap. Proses *Collaborative Governance* terdapat 5 tahapan, sebagai berikut.

A. Dialog Tatap Muka, *Collaborative Governance*

Collaborative Governance terbentuk melalui dialog antar pemangku kepentingan untuk membangun kesepahaman, mencapai konsensus, dan mengidentifikasi peluang kerja sama yang memberikan manfaat bersama.

B. Membangun Kepercayaan, Dalam

pembangunan kepercayaan, Interaksi komunikasi yang konsisten memperkuat kepercayaan, sehingga hubungan antar pihak berjalan optimal. Proses ini membutuhkan komitmen kuat dan waktu panjang karena kepercayaan dibangun secara bertahap dan berkelanjutan.

C. Komitmen Pada Proses Kolaborasi,

Para pemangku kepentingan saling bergantung dan bertanggung jawab tinggi, sehingga tercipta komitmen kuat untuk kolaborasi berkelanjutan yang saling menguntungkan.

D. Pemahaman Bersama, Tahap ini mengharuskan para aktor bertukar informasi secara terbuka, merumuskan tujuan kolaboratif, mengidentifikasi masalah bersama, dan menyamakan persepsi mengenai nilai yang ingin dicapai.

E. Hasil Sementara, Kolaborasi cenderung berkelanjutan jika memberikan manfaat nyata bagi pihak terlibat, meski kecil, karena dampak positif tersebut memperkuat saling percaya dan membangun komitmen bersama.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Collaborative Governance

Mengacu pada Menurut Government of Canada (2008), pendukung dan penghambatan dalam proses *Collaborative Governance* dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut :

a. Faktor Budaya, Kegagalan kolaborasi sering disebabkan budaya birokratis yang kaku, pendekatan top-down, minim partisipasi pemangku kepentingan, dan praktik kooptasi manipulatif, sehingga menghambat inovasi, kesetaraan,

inklusivitas, dan efektivitas kemitraan.

b. Faktor Kelembagaan, Kolaborasi antarlembaga terhambat oleh struktur hierarkis dan akuntabilitas kaku pemerintah, yang bersifat top-down dan administratif, sehingga sulit selaras dengan prinsip kolaborasi horizontal, partisipatif, dan berorientasi hasil.

c. Faktor Politik, Kolaborasi antarlembaga terhambat oleh struktur hierarkis dan akuntabilitas pemerintah yang kaku, top-down, dan administratif, sehingga sulit selaras dengan prinsip kolaborasi horizontal, partisipatif, dan berorientasi hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lain dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang. Fokusnya pada interaksi antar aktor, motivasi, persepsi, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan pelaksanaan kolaborasi, tantangan, dan faktor pendukung strategi mitigasi. Hasilnya menjelaskan peran aktor serta proses membangun kolaborasi efektif dalam kerangka *Collaborative Governance* guna menghadapi banjir rob secara berkelanjutan.

Jenis data yang digunakan bersifat

kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi dengan analisis domain. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses *Collaborative Governance* dalam permasalahan bencana banjir rob di Tanjung Mas Kota Semarang

Kelurahan Tanjung Mas di Semarang Utara kerap terdampak banjir rob karena letaknya yang rendah, penurunan muka tanah, dan sistem drainase yang kurang memadai. Luapan air mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan masalah kesehatan serta ekonomi. Penanganan banjir ini dilakukan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kota, dan BBWS, yang melibatkan dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, hingga pencapaian hasil sementara (Ansell & Gash, 2008), dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga terdampak.

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka dalam kolaborasi penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas sudah diterapkan melalui forum FPRB yang melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah daerah, BPBD Kota Semarang, Dinas PU, dan masyarakat Tanjung Mas. Forum ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk saling bertukar informasi, pandangan, dan data terkait kondisi bencana, khususnya banjir rob. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat yang biasanya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program yang diusulkan.

Hal ini menghambat kesempatan untuk mendapatkan kontribusi yang optimal dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, komunikasi atau diskusi tatap muka dalam proses *Collaborative Governance* belum terlaksana secara rutin. Dialog biasanya hanya dilakukan saat ada keluhan atau hal penting yang perlu dibicarakan, bahkan sebagian besar terjadi saat bencana berlangsung. Meskipun demikian, forum diskusi tatap muka tetap menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan banjir rob secara bersama antar aktor.

b. Membangun Kepercayaan

Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan banjir rob, Kelurahan Tanjung Mas membentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dan TAGANA sebagai forum koordinasi dan respon cepat. BPBD, Dinas PU, dan BBWS turut berperan melalui sosialisasi rencana penanganan serta layanan pengaduan bagi masyarakat. Partisipasi warga terlihat dari keterlibatan dalam forum dan pemeliharaan fasilitas penanggulangan, meski masih ada tantangan terkait kepercayaan publik. Banyak warga merasa aspirasi mereka belum ditanggapi secara cepat, sementara pengalaman puluhan tahun menghadapi rob tanpa solusi signifikan menimbulkan pesimisme.

Kepercayaan masyarakat menjadi indikator penting dalam keberhasilan kolaborasi, sesuai prinsip *Collaborative Governance*, karena rasa saling percaya dan tanggung jawab antar-stakeholder menjadi fondasi kolaborasi. Selain pelatihan teknis, dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait memegang peran utama dalam pendekatan kolaboratif, edukatif, dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan hubungan sosial dan kepercayaan publik masih sangat diperlukan agar kolaborasi berjalan optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tantangan utama adalah rendahnya kepercayaan masyarakat akibat lambatnya respons pemerintah, namun pemerintah tetap berupaya menindaklanjuti dengan baik. Membangun kepercayaan menjadi kunci keberhasilan kolaborasi, yang mencakup tidak hanya pelatihan teknis, tetapi juga interaksi sosial antara semua pihak terkait dalam penanganan banjir rob secara partisipatif.

c. Komitmen Pada Proses Kolaborasi

Komitmen terhadap kolaborasi dalam penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas memberikan manfaat signifikan bagi keberlanjutan program mitigasi. Komitmen ini terlihat dari keterlibatan aktif pemerintah kelurahan, instansi teknis seperti BPBD, Dinas PU, BBWS, serta partisipasi masyarakat RW 14 dan RW 15, yang menciptakan komunikasi, koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan program lebih terarah. Partisipasi ini juga memperkuat legitimasi dan rasa kepemilikan masyarakat, sehingga kegiatan mitigasi seperti sosialisasi, gotong royong, forum siaga bencana, dan monitoring pembangunan infrastruktur dapat berjalan responsif dan berkelanjutan.

Namun, proses kolaborasi masih menghadapi kendala, terutama mekanisme komunikasi dan evaluasi yang belum optimal, sehingga dialog antar lembaga terbatas dan informasi tidak merata. Monitoring lapangan cenderung bersifat responsif dan belum

menjangkau seluruh wilayah karena keterbatasan waktu, SDM, dan kapasitas teknis. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen saja tidak cukup tanpa sistem pelaporan, evaluasi berkala, pembagian peran yang jelas, dan penguatan koordinasi lintas aktor. Keberhasilan kolaborasi, dengan demikian, ditentukan tidak hanya oleh kemauan terlibat, tetapi juga kemampuan menciptakan mekanisme kerja yang sistematis, adaptif, dan konsisten.

d. Pemahaman Bersama

Dalam kerangka *Collaborative Governance*, Ansell dan Gash menekankan pentingnya pencapaian tujuan bersama. Di Tanjung Mas, kesepahaman ini terlihat dalam sosialisasi dan koordinasi pembangunan tanggul serta pengendalian banjir rob, yang bertujuan melindungi masyarakat dari genangan. Kesamaan pemahaman antar aktor pemerintah kelurahan, masyarakat, BBWS, BPBD, dan Dinas PU terwujud melalui komunikasi terbuka, forum diskusi, rapat koordinasi, dan kegiatan sosialisasi. BBWS memperkuat pemahaman melalui koordinasi teknis dan penyamaan data, sementara masyarakat berpartisipasi aktif melalui sosialisasi, pelaporan kondisi lapangan, dan gotong royong.

Pembangunan *sheet pile* menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi berbasis kesepahaman mampu menghasilkan solusi

efektif, shared understanding penting untuk meminimalkan perbedaan persepsi. Secara keseluruhan, proses ini mencerminkan prinsip *Collaborative Governance*, di mana semua aktor bekerja selaras menuju tujuan bersama, dengan peran dan langkah yang jelas bagi setiap pihak untuk menangani banjir rob secara efektif.

e. Hasil Sementara

Proses kolaborasi dalam penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas menunjukkan perkembangan pada tahap *intermediate outcomes*. Koordinasi antaraktor seperti BPBD, Dinas PU, BBWS, pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pihak terkait semakin intens melalui komunikasi dan pertemuan bersama. Setiap aktor mulai memahami perannya, sehingga kegiatan di lapangan menjadi lebih terarah. Hal ini tercermin dari pembangunan tanggul laut, perbaikan drainase, saluran air yang kembali berfungsi, serta respons darurat yang lebih cepat. *Intermediate outcomes* kolaborasi tercermin dari meningkatnya efektivitas koordinasi dan munculnya hasil awal yang mendukung penyelesaian masalah.

Meski demikian, efektivitas kolaborasi belum sepenuhnya maksimal. Dialog tatap muka masih terkendala oleh sistem informasi yang belum merata, miskomunikasi, dan perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan. Pembangunan kepercayaan publik juga terbatas, dan mekanisme komunikasi

antaraktor belum optimal. Akibatnya, koordinasi dan kesinambungan program penanganan banjir rob belum dapat berjalan sepenuhnya lancar, sehingga penyelesaian penuh tetap membutuhkan proses bertahap dan dukungan berkelanjutan dari seluruh pihak.

Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam permasalahan bencana banjir rob di Tanjung Mas Kota Semarang

Berdasarkan *Government of Canada* menegenai *Collaborative Governance* (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor dalam proses *Collaborative Governance*, hal ini termasuk juga dalam konteks penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam upaya mengatasi permasalahan bencana banjir rob. Berikut merupakan penjelasan mengenai faktor-faktir tersebut:

a. Faktor Budaya

Budaya memiliki peran ganda dalam penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Budaya gotong royong yang masih kuat menjadi modal sosial penting, mendorong warga sigap membantu satu sama lain melalui kerja bakti, penataan lingkungan, dan penguatan tanggul darurat. Keterlibatan ini membuat respons lapangan lebih cepat

dan efektif, terutama ketika infrastruktur teknis pemerintah membutuhkan waktu untuk diselesaikan, sehingga budaya lokal berperan sebagai kekuatan utama dalam mitigasi rob.

Namun, terdapat hambatan budaya yang memengaruhi efektivitas penanganan rob. Sikap pasrah akibat terbiasa hidup berdampingan dengan banjir membuat sebagian warga kurang aktif mengikuti sosialisasi atau forum kebencanaan. Mispersepsi terkait program penanganan, seperti kekhawatiran nelayan terhadap pembangunan tanggul atau ketakutan kehilangan ganti rugi lahan, juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, meski gotong royong memperkuat mitigasi, hambatan berupa kurangnya partisipasi perlu diatasi melalui komunikasi dan edukasi intensif agar kolaborasi penanganan rob berjalan optimal.

b. Faktor Kelembagaan

Penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas menunjukkan kompleksitas faktor kelembagaan. Koordinasi antar instansi seperti kelurahan, BPBD, dan Dinas PU berjalan cukup baik melalui komunikasi rutin dan diskusi, namun hambatan tetap muncul, termasuk perbedaan pendapat, kewenangan, miskomunikasi, keterlambatan informasi, dan perubahan alokasi anggaran yang mengganggu perencanaan teknis. BBWS Pemali Juana terbatas kewenangannya sehingga memerlukan dukungan pemerintah

daerah, yang menyebabkan penundaan pekerjaan infrastruktur, termasuk masalah lahan dan kebocoran tanggul. Di sisi masyarakat RW 14 dan RW 15, kapasitas organisasi rendah dan partisipasi tidak merata sehingga informasi dan respons darurat tidak seimbang, diperparah prosedur birokrasi yang panjang.

Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor yang adaptif, responsif, dan selaras. Regulasi yang ada menjadi payung hukum bagi kolaborasi antar aktor, sementara penguatan koordinasi dapat meminimalisir hambatan kelembagaan, meningkatkan efektivitas penanganan rob, memperjelas kewenangan, mempercepat aliran informasi, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi banjir rob. Dengan demikian, kolaborasi yang lebih terstruktur dan komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan penanganan rob di seluruh tingkat pelaksana maupun masyarakat terdampak.

c. Faktor Politik

Faktor politik memainkan peran penting dalam keberhasilan kolaborasi penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Kebijakan, kepentingan politik, dan pergantian kepemimpinan memengaruhi arah program, prioritas proyek, penyaluran bantuan, dan efektivitas koordinasi antar instansi. Meski kolaborasi umumnya

berjalan sesuai fungsi masing-masing aktor, penyesuaian kebijakan akibat pergantian pejabat dan kepentingan politik sering menimbulkan tumpang tindih bantuan, perubahan prioritas proyek, serta hambatan regulasi dan anggaran, sebagaimana dialami BPBD, Dinas PU, dan BBWS Pemali Juana.

Di sisi masyarakat, isu banjir rob kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek, yang mendorong orientasi program bersifat pencitraan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang konsisten, penyelarasan kebijakan, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas sektor agar kolaborasi antar stakeholders dalam penanganan banjir rob dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan temuan lapangan, mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang merupakan proses kompleks dan berkelanjutan, dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Efektivitas penanganan bencana membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait secara terstruktur, serta kerja sama terintegrasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi menjadi kunci sistem penanggulangan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap

tantangan wilayah pesisir. Simpulan penelitian ini adalah:

1. *Collaborative Governance dalam mitigasi penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang*

Collaborative Governance melibatkan BPBD, Dinas PU, BBWS, pemerintah kelurahan, FPRB, dan masyarakat melalui koordinasi rutin, pembagian peran jelas, dan forum FPRB yang menyelaraskan strategi teknis. Hambatan masih ditemukan, seperti miskomunikasi, perbedaan pendapat dan kewenangan, sistem informasi tidak merata, rendahnya kepercayaan publik akibat respons pemerintah yang lambat, serta mekanisme komunikasi yang belum optimal.

2. *Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam mitigasi banjir rob*

Faktor pendukung meliputi koordinasi antarinstansi yang solid, komitmen bersama, struktur komunikasi jelas, dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan serta tindakan awal. Hambatan meliputi keterbatasan anggaran, perbedaan prioritas antarinstansi, dan regulasi teknis yang belum sinkron. Hambatan ini dapat diminimalkan melalui komitmen bersama dan kesadaran bahwa penanganan banjir rob merupakan kebutuhan mendesak masyarakat pesisir.

SARAN

Menurut hasil penelitian penulis menemukan gap penelitian *Collaborative Governance* dalam mitigasi penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang dan Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam mitigasi banjir rob. Terdapat saran yang ditulis peneliti, sebagai berikut:

1. Penguatan mekanisme *Collaborative Governance*

Perlu dilakukan agar kolaborasi tidak hanya formal tetapi efektif. Pemerintah dan aktor terkait disarankan meningkatkan dialog tatap muka yang terstruktur dan inklusif melalui pertemuan rutin dengan agenda jelas, standarisasi alur koordinasi, serta kejelasan peran antaraktor. Transparansi dan responsivitas pemerintah penting untuk membangun kepercayaan publik, termasuk penyampaian informasi program dan progres kegiatan secara terbuka. Fungsi FPRB perlu diperkuat sebagai jembatan komunikasi dan forum evaluasi kolaborasi, sehingga komitmen terjaga dan efektivitas mitigasi meningkat.

2. Penguatan faktor pendukung dan penanganan faktor penghambat

Penguatan faktor pendukung dan penanganan penghambat sangat penting untuk keberhasilan kolaborasi. Partisipasi masyarakat sebaiknya ditingkatkan melalui

edukasi kebencanaan yang rutin, serta keterlibatan dalam pemeliharaan drainase, pembersihan jalur air, dan pemantauan potensi banjir. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian aktif dari sistem mitigasi. Sementara itu, pemerintah perlu memperjelas regulasi teknis antarinstansi untuk memastikan batas kewenangan dan pembagian tugas jelas, serta meningkatkan sinkronisasi program agar perbedaan prioritas tidak menghambat kerja sama. Selain itu, perencanaan jangka panjang yang fokus pada adaptasi kawasan pesisir perlu dirancang, sehingga kolaborasi tidak sekadar menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga membangun ketahanan wilayah terhadap ancaman banjir rob di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in theory and practice." *Journal of public administration research and theory* 18.4 (2008): 543-571.
- Astuti, Retno Sunu. (2021). *Collaborative Governance dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring di masa pandemi covid*. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 265-280.
- Auliansyah, Rahadian. "Implementasi roadmap reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang." *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1.1 (2024): 1-10.
- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. "Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024." *BNPB*, Jakarta 1 (2020): 115.
- Cahyani, Melinda Putri Lutfi, and Ela Kurniasari. "Beban Administrasi Pada Program BPBD Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.11 (2024): 407-417.
- Febrian, Ranggi Ade. "Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi)." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 1.2 (2015): 200-208.
- Febriana, Kharisma Ayu, et al. "Peningkatan Mitigasi Bencana Banjir Melalui Media Digital di Kampung Tambakrejo, Tanjung Emas, Semarang." *Jurnal DIMASTIK* 3.2 (2025): 178-185.
- Gravelle, M., et al. "Collaborative Governance and Changing Federal Roles. A Public Policy Forum and the Policy Research Initiative Joint Roundtable Outcomes Report." *Retrieved June 1 (2008)*: 2009.
- Hardi, Warsono. "Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik." (2020).
- Hasna, Alyaa Larasati, and Awang Darumurti. "Collaborative Governance dalam mitigasi bencana banjir rob di kota pekalongan." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* (2023): 25-37.
- Hidayatullah, Muhammad Arif, Hartuti Purnaweni, and Teguh Yuwono. "Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8.4 (2023): 276-285.
- Latifah, Hazimah, Herbasuki Nurcahyanto, and Aufarul Marom. "Analisis Proses Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 13.3 (2024): 29-46.
- Nurlaila, Nurlaila, and Mas'ud Mas'ud. "Manajemen Pra Bencana Alam Di Kabupaten Bima Dalam Perspektif

- Collaborative Governance." Serat Acitya 12.1 (2023): 94-104.*
- Surjadi, S., Herwati, A. R., & Warsono, H. (2022). *Collaborative Governanceon Slum Upgrading in Cultural Heritage Area: A Case Study of Pulau Penyengat, Indonesia. Journal of Madani Society*, 1(3), 150-157.
- Warsono, H., Yuwono, T., & Putranti, I. R. (2023). *Analyzing technology acceptance model for Collaborative Governancein public administration: Empirical evidence of digital governance and perceived ease of use. International Journal of data and network science*, 7(1), 41-48.
- Yusuf, I. M., Kismartini, K., & Huda, M. N. (2024). Pengembangan Wisata Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Rembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(2), 225-234.
- Sumber Online**
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Indeks risiko bencana Indonesia. BNBP.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. (2023). Laporan kejadian dan dampak banjir rob Kota Semarang tahun 2022–2023. BPBD Kota Semarang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024. Bappenas.
- BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SEMARANG, (2024), "Ekonomi Kota Semarang Tahun 2024".
- BPBD Kota Semarang (2022). Laporan Penanganan Banjir Rob Semarang Utara.
- Instagram Kelurahan Kota Semarang (2025).*
<https://www.instagram.com/keltanjungmas/?hl=en>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Cambridge University Press.*
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017). Kajian penurunan muka tanah di wilayah pesisir utara Jawa. Kementerian ESDM.
- Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. (2023). Aktivitas pelabuhan Semarang terganggu akibat banjir rob. Antara News.*
- PPID Semarang Kota, (2024), "Profil Kota Semarang". *PPID.SemarangKota.com*.
- Pustaka Data Semarang Kota, (2024), "KOTA SEMARANG DALAM ANGKA SEMARANG MUNICIPALITY IN FIGURES 2024", (51).
- Tanjung Mas Semarang Kota, (2025), "Profil Kelurahan Tanjung Mas".
Tanjungmas.SemarangKota.com

